

**STRATEGI MEMPEROLEH HAK-HAK ISTERI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister (Strata Dua)

Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**MUNTIYONO
2011-02-004**

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SEBELUM DIUJI

**STRATEGI MEMPEROLEH HAK-HAK ISTERI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI)**

Disusun oleh :

MUNTIYONO

2011-02-004

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister pada Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sukresno, SH., M.Hum



Suciningtyas, SH., M.Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS**

HALAMAN PERSETUJUAN

STRATEGI MEMPEROLEH HAK-HAK ISTERI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI)

Disusun oleh :

MUNTIYONO

2011-02-004

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal

Pembimbing Utama,



Dr. Sukresno, SH., M.Hum

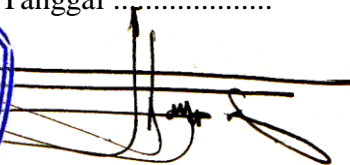
Pembimbing Pendamping,



Suciningtyas, SH., M.Hum

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister

Tanggal



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUNTIYONO

NIM : 2011-02-004

Alamat : Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Kudus, Agustus 2015
Yang membuat pernyataan

MUNTIYONO

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahNya Tesis yang berjudul “Strategi Memperoleh Hak – Hak Isteri Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)” dapat terselesaikan. Namun demikian penulis mengakui masih terdapat kekurangan disana-sini dari segi penulisan suatu karya ilmiah.

Penyusunan Tesis ini tidak dapat diselesaikan dari bantuan berbagai pihak, baik materiil maupun spiritual, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terhingga dan pemberian penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, SH.MS Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.
3. Dr. Sukresno, SH, M.Hum, sebagai dosen pembimbing yang di dalam berbagai kesibukan dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini.
4. Ibu Suciningtyas, SH, M.Hum, sebagai pembimbing pendamping yang membimbing sehingga penulisan tesis ini tersusun dengan baik.
5. Bapak H. Abdullah Said, SH Ketua Pengadilan Pati yang memberi ijin survey kepada penulis untuk mendapatkan penelitian.
6. Bapak Moh. Munawir selaku Panitera Pangadilan Pati yang memberi masukan dalam penyediaan data pada penelitian.
7. Bapak Gufron Su’udi,SH; Bapak Mubassirin,SH; Bapak Joko Sukendro,SH bersama rekan – rekan selaku pengacara di Pati yang yang senantiasa memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh dosen pengajar dan karyawan pada program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
9. Isteri dan anak – anakku yang telah mendukung dan menyemangati sehingga dapat menggugah penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Dari semuanya itu penulis hanya dapat berdo'a semoga amal dan jasa baik mereka di terima Tuhan Yang maha Esa dan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Akhirnya penelitian yang masih jauh dari kesempurnaan ini, penulis berharap semoga dapat menambah wawasan keilmuan kita yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Pati, Agustus 2015
Peneliti

MUNTIYONO
NIM : 2011-02-004



ABSTRAK

Strategi Memperoleh Hak – Hak Isteri Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)

Selama ini mungkin belum ada Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan eksekusi atas putusan cerai talak yang direkonpensi oleh isteri. Pengadilan Agama tidak berani mengabulkan permohonan eksekusi yang di ajukan oleh isteri terhadap putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak (suami) dan mengabulkan pula gugatan rekonpensi yang diajukan isteri atas hak-haknya yang diantaranya tentang gugatan harta bersama, walaupun putusan Pengadilan Agama tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pemohon (suami) belum mengikrarkan talaknya maka secara yuridis masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai).

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk : mengetahui dan menganalisis peraturan perundangan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan untuk memperoleh haknya; untuk mengetahui kendala hukum perlindungan hukum terhadap isteri atas hak-haknya yang dipersengketakan; untuk mengetahui strategi untuk memperoleh hak – hak isteri dalam perkara perceraian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan ketentuan yang berhubungan strategi memperoleh hak-hak isteri dalam perkara perceraian. Teknik sampling yang dipakai adalah *snowball sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*.

Isteri tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendapatkan haknya apabila yang mengajukan permohonan cerai talak adalah suami dengan cara mengajukan gugatan rekonpensi dikarenakan biaya perkara tersebut telah di tanggung oleh pemohon (suami), akan tetapi tetap masih ada kendala untuk mendapatkan hak-haknya apabila suami tidak mau mengucapkan ikrar talak. Pembuktian sengketa harta bersama harus dilakukan dalam persidangan, agar dapat diketahui bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan.

Gugatan rekonpensi yang diajukan isteri yang terbentur dengan ketentuan normatif pasal 70 ayat (6) UU.No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, apabila suami tidak mau mengucapkan ikrar talaknya maka langkah yang dapat ditempuh isteri untuk mempertahankan haknya yaitu dengan melaporkan kepada kepolisian tindakan suami tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat strategi untuk memperoleh hak isteri sebagai pilihan hukum yang dapat ditempuh dalam perkara perceraian yaitu (1) perdamaian (mediasi) (2) gugatan rekonpensi (3) komulasi gugatan perceraian (4) gugatan gono-gini setelah perceraian (5) melaporkan KDRT.

Kata Kunci : Hak Isteri, Perceraian, Rekonpensi, Ikrar Talak

ABSTRACT

Strategy Getting Wife's Rights In Divorce Case (Case Study in Religious Court Pati)

During this time may be no courts that granted the execution of the judgment of divorce Counterclaim by the wife. Religious courts do not dare to grant the proposed execution by the wife against the decision that has been granted a divorce (husband) and also granted the lawsuit filed Counterclaim wife of his rights which include about lawsuits joint property, although the decision of the Religious Court does have the power the law remains, because the Applicant (the husband) has not Pledge Separations then legally still bound in marriage (not divorced).

Goals to be achieved in this study are to: identify and analyze the laws on the legal protection of women to obtain their rights; to determine the legal constraints of legal protection against the wife of his rights are disputed; to determine a strategy to obtain the rights of the wife in a divorce case.

The method used in this research is empirical juridical approach. Specifications of research used is descriptive analytical describe provisions relating acquire rights strategy and wife in their divorce case. The sampling technique used is snowball sampling that is part of nonprobability sampling.

The wife does not have to spend a lot to get right if the divorce is filed for divorce the husband by filing a lawsuit Counterclaim because the court fee has been paid by the applicant (husband), but still there are still obstacles to get their rights if the husband does not will announce a pledge of divorce. Evidentiary dispute joint property must be made during the trial, in order to know that the property is not property or possessions congenital origin.

The lawsuit filed Counterclaim wife who collided with the normative provisions of Article 70 paragraph (6) UU.No. 7/1989 on Religious Courts, if the husband does not want to say the Pledge Separations then steps can be taken wives to defend their rights is to report to the police that her husband acts as stated in Article 9 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

In this study the authors used four strategies to obtain the right wife as a legal option which can be reached in a divorce case that (1) any peace (mediation) (2) Claims Counterclaim (3) cumulation divorce lawsuit (4) Claims joint property after divorce. (5) report marital violence.

Keywords: Right Wife, Divorce, Counterclaim, Pledge Separations

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEBELUM DIUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)	vi
ABSTRACT (DALAM BAHASA INDONESIA)	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ketika Perkawinan Tak Lagi Dapat Dipertahankan	36
B. Hak Isteri Yang Didapat Pasca Perceraian	38
1. Hak Mut'ah	38
2. Hak atas Nafkah Iddah	41
3. Hadlanah (Hak Mengasuh Anak)	43
4. Hak atas Harta Gawan (asal)	45
5. Hak Isteri atas Harta Bersama	46
C. Ketika Perspektif Hukum Kurang Adil Terhadap Perbedaan Gender	48

D. Manfaatkan Peluang yang Ada	57
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Untuk Memperoleh Haknya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	58
a. Pengaturan Dalam Undang-Undang	58
1) Kelebihan Pengaturan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama	58
2) Kekurangan Pengaturan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama	62
b. Studi Kasus.....	67
1) Kasus I (No Perkara :0806/Pdt.G/2013/PA.Pt)	67
2) Kasus II (No Perkara :1099/Pdt.G/2011/PA.Pt)	73
3) Kasus III (No Perkara :0796/Pdt.G/2014/PA.Pt) ...	78
B. Kendala Perlindungan Hak Istri atas Hak yang Dipersengketakan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	81
1. Keterbatasan Informasi Hukum	81
2. Gugurnya Nafkah Iddah dan Mut'ah	91
3. Pertentangan dalam Praktik Beracara	93
C. Strategi Memperoleh Hak-Hak Istri dalam Perkara Perceraian	105
1. Perdamaian (mediasi)	105
2. Gugatan Rekonvensi	107
3. Kumulasi Gugatan Perceraian	120
4. Gugatan Gono-Gini setelah perceraian	127
5. Melaporkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)...	131
BAB IV : PENUTUP	
A. SIMPULAN	132
B. SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Wawancara dengan Gufron Su'udi, SH beserta kliennya

Lampiran 2 : Lembar Wawancara dengan Mubassirin, SH beserta kliennya

Lampiran 3 : Lembar Wawancara dengan Joko Sukendro, SH beserta kliennya

Lampiran 4 : Lembar Wawancara dengan H. Abdulah Said, SH

Lampiran 5 : Lembar Wawancara dengan Moh. Munawir, SH

Lampiran 6 : Salinan Putusan No : 0806/Pdt.G/2013/PA.Pt.

Lampiran 7 : Salinan Putusan No : 1099/Pdt.G/2011/PA.Pt.

Lampiran 8 : Salinan Putusan No : 0796/Pdt.G/2014/PA.Pt.

